PENDEKATAN KOMPARATIF DALAM ANTROPOLOGI HUKUM

“MAKALAH”

Nama Mahasiswa : IQBAL ARISTA PRIMA DONI

No BP : 2010003600088

Lokal : 1h9

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

2021

A. LATAR BELAKANG

Secara etimologis, Antropologi tersusun dari bahasa Latin *anthropos* yang artinya manusia, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Antropologi berarti: “berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, antropologi diartikan sebagai: Ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi hukum (dengan beberapa pengecualian yang sangat jarang) menghindari prasangka etnosentris. Antropologi hukum mempelajari masyarakat secara komparatif tanpa memperhatikan "primitif" atau "berbudaya", dan tidak membedakan secara kualitatif demi mendukung satu jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia yang lain. Bertolak belakang dengan beberapa ilmu sosial lainnya, antropologi hukum tidak dengan semena-mena memisahkan satu segmen seperti perekonomian, struktur politik, hukum, struktur kepribadian, atau "hubungan sosial" dari kebudayaan manusia, tetapi memahami dan mempelajari kebudayaan manusia sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan. Antropologi hukum adalah sebuah ilmu hukum sehingga memiliki sifat empiris. Teori harus didukung fakta atau setidaknya ada sampel yang representatif terhadap semua fakta.

Dalam hal ini otomatis hal yang harus di perhatikan adalah bagaimana metode pendekatan yang di lakukan untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan dalam masyarakat adalah dengan menggunakan metode komparatif dalam menelaah suatu permasalahan yang ada sehingga output yang di hasilkan akan memuaskan penelitian dengan metode komparative ini. Metode komparatif ini kuncinya adalah bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah kemungkinan menafsirkan peristiwa menurut cara masyarakat itu sendiri. Penelitian ini tentunya harus di lakukan dengan cara tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang lama, agar mendapatkan tafsiran dari masyarakat tentang hukum yang

diamalkanya. Jadi pendekatan pada intinya setiap penelitian yang dilakukan oleh antropolog, memiliki karakteristik masing-masing, dan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan antropologi, bisa memilih contoh yang telah ada atau menggunakan pendekatan baru yang diinginkan.

Metode ini menjadi kebiasaan antropologi sejak permulaan sejarahnya. Hal tersebut dikarenakan antropologi selalu menghadapi gejala aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan yang besar. Berbagai metode komparatif (perbandingan) sudah dikembangkan, salah satu diantaranya adalah metode perbandingan "lintang kebudayaan" atau "cross-cultural method". Cara kerja metode ini adalah dipergunakan satu atau beberapa gejala sosial budaya yang serupa dalam suatu sampel (contoh) yang cukup besar dari kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang tersebar luas.

Oleh karena itu dengan menerapkan metode komparatif ini adalah hal yang memungkinkan untuk kita mendapatkan bagaimana memahami masyarakat dalam mempertahankan budaya-budaya ataupun karakteristik nilai-nilai yang di junjung dalam mempertahankan hal tersebut khususnya dalam bidang hukum atau antropologi hukum itu sendiri.

Rumusan masalah

1. Apa yang di maksud dengan pendekatan komparatif?
2. Bagaimana korelasi pendekatan komparatif dengann antropologi hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah antropologi hukum

Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan: hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inheren dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Tema kajian pada fase awal studi-studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologis lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (*primitive*), tradisional (*traditional*), dan kesukuan (*tribal*) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Sedangkan, metode kajian yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai *armchair methodology*, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk, dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin *documentary data* yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan-laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya. Pada awal abad ke-20 metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan (*fieldwork methodology*) dalam studi-studi

antropologis tentang hukum. Karya Barton, misalnya, yang berjudul *Ifugao Law* yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil dari *fieldwork* yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon Philipina. Kemudian, muncul karya Malinowski berjudul *Crime and Custom in Savage Society* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasific, dan seterusnya sampai sekarang metode *fieldwork* menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum.

Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu ? apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan ?; bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat ? Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel bertajuk *The Cheyenne Way* (1941) merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi dalam masyarakat suku Cheyenne (suku Indian) di Amerika Serikat.

Kemudian, Hoebel mempublikasikan *The Law of Primitive Man* (1954), disusul dengan karya Gluckman mengenai hukum orang Barotse dan Lozi di Afrika, karya Bohannan mengenai hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapauku di Papua. Fase perkembangan tema studi antropologi hukum ke arah mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa seperti disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of dispute settlements*. Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi

kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka. Karya Bohannon, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum negara-negara sedang berkembang.

Sejak tahun 1970-an tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia, melalui Berkeley Village Law Projects, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum. Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von Benda-Beckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat dan di pengadilan negeri di Sumatera Barat.

Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan, dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial (*social security*), pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Studi-

studi ini dikembangkan oleh Agrarian Law Department Wageningen Agriculture University. Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa, interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of legal pluralism*. Kecenderungan yang berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi antropologi hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (*state law*) dengan hukum rakyat (*folk law*) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa.

Pada tahun 2005 penelitian Yanis Maladi memberikan informasi tentang pandangan dan sikap warga masyarakat tentang hukum negara (*state law*) perihal pendaftaran tanah nasional, dimana sebagian besar warga masyarakat kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan pendaftaran tanahnya meskipun undang-undang (hukum negara) mewajibkan setiap bidang tanah didaftarkan untuk memperoleh ertifikan. Namun pada kenyataanya sebagian warga masyarakat setempat enggan atau tidak ingin mendaftarkan tanahnya dengan berbagai pertimbangan bahwa hukum yang bersumber dari hukum lokal (Indigenous people law) dirasakan manfaat dan keampuhannya melindungi hak-hak mereka ketika dihadapkan dengan masalah sengketa yang diajukan ke Pengadilan.

Dari berbagai gambaran dan informasi hasil-hasil penelitian terurai di atas menunjukkan bahwa ilmu antropologi hukum telah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dan untuk dimaklumi, sajian materi dalam buku Antropologi Hukum ini, bersumber dari racikan bacaan hasil penataran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum bagi staf pengajar Fakultas Hukum seluruh Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Inonesia (UI) sejak tahun 1994 dalam rangka

penyiapan materi mata kuliah Antropologi Hukum yang pada saat itu merupakan mata ajar/mata kuliah baru di fakultas hukum.

2. Sekilas tentang Perkembangan Antropologi

Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Kajian antropologi ini setidaknya dapat ditelusuri pada zaman kolonialisme di era penjajahan yang dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin serta suku Indian. Selain menjajah, mereka juga menyebarkan hukum Nasrani. Setiap daerah jajahan, ditugaskan pegawai kolonial dan missionaris, selain melaksanakan tugasnya, mereka juga membuat laporan mengenai bahasa, ras, adat istiadat, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan jajahan. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad 19. Pada abad ini, antropologi sudah digunakan sebagai pendekatan penelitian yang difokuskan pada kajian asal usul manusia. Penelitian antropologi ini mencakup pencarian fosil yang masih ada, dan mengkaji keluarga binatang yang terdekat dengan manusia (primate) serta meneliti masyarakat manusia, apakah yang paling tua dan tetap bertahan (survive). Pada waktu itu, semua dilakukan dengan ide kunci, ide tentang evolusi.

3. Antropologi

Secara etimologis, Antropologi tersusun dari bahasa Latin *anthropos* yang artinya manusia, dan bahasa Yunani *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Antropologi berarti: “berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, antropologi diartikan sebagai: Ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Definisi antropologi menurut para ahli yaitu :

1. William A. Havilland: Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekarhukumn manusia.
2. David Hunter: antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
3. Koentjaraningrat: antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang di hasilkan.

4. Karakteristik dasar pendekatan antropologi

Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Para antropolog harus melihat hukum dan praktik pertanian, kekeluargaan, politik, magic, dan pengobatan secara bersama-sama. Maksudnya hukum tidak bisa dilihat sebagai sistem otonom yang tidak terpengaruh oleh praktik-praktik sosial lainnya. Beberapa tahun terakhir, ketika dekonstruksi postmodernisme yang sedang digemari menjalar melalui ilmu sosial, pendekatan holistik mendapat serangan. Jika ada masa-masa keemasannya, kerangka kerja fungsionalisme struktural lebih membesarkan watak sistematis yang ditelitinya, namun saat ini sudah dibuka peluang terhadap fungsionalis struktural. Karya yang melakukan hal ini dapat dilihat dalam *Lugbara Religion* hasil penelitian Middleton. Dalam karyanya tersebut, dia lebih senang memilih istilah Inggris daripada bahasa Lugbara itu sendiri, misalnya *ancertor* (nenek moyang), *ghost* (hantu), *witchcraft* (ilmu ghaib) dan *sorcery* (ilmu sihir).

Kendatipun demikian, karya Middleton tidak mengurangi kekayaan etnografi, buktinya siapa saja yang membaca hasil karyanya masih merasakan proses aksi sosial dan hukum seperti yang benar-benar dipraktikan. Dengan caranya ini, terlihat adanya pergeseran karakteristik penelitian, dari karakteristik struktural ke “makna”. Ada 4 (empat) ciri fundamendal cara kerja pendekatan antropologi terhadap hukum yaitu sebagai berikut: 1. Bercorak descriptive, bukannya normatif. 2. Local practices , yaitu praktik konkrit dan nyata di lapangan. 3. Antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh (connections across social domains). 4. Comparative. Karakteristik antropologi bergeser lagi dari antropologi “makna” ke antropologi interpretatif yang lebih global, seperti yang dilakukan oleh C. Geertz. Ide kuncinya bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah kemungkinan menafsirkan peristiwa menurut cara pandang masyarakat itu sendiri. Penelitian seperti ini harus dilakukan dengan cara tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang lama, agar mendapatkan tafsiran dari masyarakat tentang hukum yang diamalkannya. Jadi, pada intinya setiap penelitian yang dilakukan oleh antropolog, memiliki karakteristik masing-masing, dan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan antropologi, bisa memilih contoh yang telah ada atau menggunakan pendekatan baru yang diinginkan.

5. Atropologi hukum

Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki.

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohanan.

Menurut J.B. Daliyo dkk, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Kemudian Hilman Hadikusuma memberikan pendapat mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.

6. Ilmu hukum

Definisi ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri.

Beberapa pakar hukum telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi ilmu hukum. Diantara definisi ilmu hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut, secara umum memiliki kesamaan satu sama lain. Para pakar hukum yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi ilmu hukum, antara lain: J.B. Daliyo, Satjipto Rahardjo, Gijssels dan van Hoecke, Radbruch, Paul Scholten dan Mochtar Kusumaatmadja.

Berdasarkan pendapat dari para pakar tersebut, secara umum dapat disimpulkan definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja karena juga membutuhkan

perbandingan mengenai hukum ditempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu secara sederhana, dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyek kajiannya atau obyek telaahannya adalah hukum.

Legal Science adalah istilah bagi ilmu hukum di Negara Inggris. Penggunaan istilah tersebut akan berbeda jika diterjemahkan secara etimologi. Istilah legal (lex: latin) ketika diterjemahkan bisa berarti undang-undang dan science berarti ilmu. Sehingga legal science justru bisa berarti ilmu tentang undang-undang.

Untuk menghindari kekeliruan tersebut, maka ilmu hukum dalam bahasa Inggris akan lebih tepat bila menggunakan istilah Jurisprudensi. Oleh karena Jurisprudensi berasal dari kata iusris dan prudentia dalam bahasa latin, yang berarti hukum dan pengetahuan. Dengan demikian, Jurisprudensi juga dapat berarti pengetahuan tentang hukum.

7. Arena kajian antropologi hukum

- SKajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.
- Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum.
- Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat.

- Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar.
- Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan.
- Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

8. Ruang lingkup antropologi

Bagi seorang antropologi, suatu gejala hukum timbul, apabila ada perikelakuan yang sedemikian rupa sehingga dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat.

Oleh karena itu, hukum sebagai aspek kebudayaan, mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh E.A. Hoebel, yaitu :

- Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat.
- Menetralisasikan kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
- Merumuskan kembali pedoman yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok, apabila terjadi berbagai perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup antropologi hukum hendaknya dikaitkan dengan beberapa fungsi hukum, yaitu sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar interaksi sosial, dan sarana pembaruan.

C. KESIMPULAN

Pendekatan komparatif Metode ini menjadi kebiasaan antropologi sejak permulaan sejarahnya. Hal tersebut dikarenakan antropologi selalu menghadapi gejala aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan yang besar. Berbagai metode komparatif (perbandingan) sudah dikembangkan, salah satu diantaranya adalah metode perbandingan "lintang kebudayaan" atau "*cross-cultural method*". Cara kerja metode ini adalah dipergunakan satu atau beberapa gejala sosial budaya yang serupa dalam suatu sampel (contoh) yang cukup besar dari kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang tersebar luas.

Pendekatan komparatif Metode ini menjadi kebiasaan antropologi sejak permulaan sejarahnya. Hal tersebut dikarenakan antropologi selalu menghadapi gejala aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan yang besar. Berbagai metode komparatif (perbandingan) sudah dikembangkan, salah satu diantaranya adalah metode perbandingan "lintang kebudayaan" atau "*cross-cultural method*". Cara kerja metode ini adalah dipergunakan satu atau beberapa gejala sosial budaya yang serupa dalam suatu sampel (contoh) yang cukup besar dari kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang tersebar luas.

Kemudian korelasi antara pendekatan tersebut adalah bagaimana hukum bisa di kaji dengan secara komprehensif artinya kita bisa melihat bagaimana antropologi dan hukum mempunyai metode untuk menemukan hal-hal yang konkret. Dan juga mendapatkan perbandingan bagaimana hukum ataupun gejala hukum dalam masyarakat bisa terdektesi dengan menggunakan pendekatan komparatif ini.

Dengan metode-metode yang khas tadi, ilmu antropologi dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap beberapa masalah tertentu yang biasanya bersifat menghambat proses proses penelitian/pendekatan yang . Antropolog diminta untuk menambah pengertian

para perencana pembangunan dengan memberikan data mendalam mengenai masalah-masalah tadi melalui jalur penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020

Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Remincel, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.

R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.